

DUNIA USAHA

Tarif Taksi Berbasis Aplikasi Wajib Persetujuan Pemda

Jakarta - Tarif taksi berbasis aplikasi ditentukan harus di bawah persetujuan pemerintah daerah masing-masing agar tidak terjadi kesenjangan tarif dengan taksi konvensional. Persetujuan pemerintah tersebut diterapkan dalam tarif batas atas dan bawah. Tarif batas atas dan bawah diatur karena selama ini taksi aplikasi menentukan sendiri tarifnya, sehingga tidak menciptakan sistem pentarifan yang adil.

NERACA

"Ada masukan dari taksi resmi, mereka minta ada tarif atas dan bawah. Jadi kalau di 'pick hour' (jam sibuk) boleh tinggi, kalau siang harus serendah-rendahnya. Itu yang akan kita atur ke depannya, jadi persaingan sehat," ujar Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Andi Yansyah usai sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, taksi aplikasi bisa menciptakan

ada argonya karena kita ingin kesamaan, tidak ada lagi kecemburuan. Dalam menentukan tarif tidak ditentukan oleh enumpang, tetapi ditegaskan atas persetujuan pemerintah," katanya.

Namun, dia mengatakan masih membahas terkait pentarifan tersebut, termasuk untuk ojek maupun ojek online. Saat ini pemerintah, dalam hal ini, Kemenhub telah menerbitkan payung hukum untuk taksi aplikasi, yaitu Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Angkutan berbasis aplikasi internet atau daring akhirnya memiliki payung hukum setelah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto dalam sosialisasi peraturan tersebut

di Jakarta, Jumat mengatakan PM tersebut diterbitkan pada 1 April 2016 dan berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan. "Peraturan ini mengatur jenis pelayanan, pengusahaan, penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan angkutan umum serta peran serta masyarakat dan sanksi administratif," paparnya.

Pudji menjelaskan untuk menyelenggarakan angkutan umum tidak dalam trayek, perusahaan wajib mempunyai izin yang dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Syarat lainnya, lanjut dia, perusahaan harus berbentuk badan hukum Indonesia, bisa berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan terbatas atau koperasi. "Adapun, persyaratan untuk memperoleh izin adalah memiliki lima kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan," ucapnya.

Karena kendaraan angkutan berbasis aplikasi da-

ring tersebut sebagian kendaraan pribadi, dia mengatakan, perusahaan bisa menyepakati perjanjian dengan pemilik kendaraan untuk mengubah STNK pribadi menjadi STNK atas nama badan usaha.

Pudji menambahkan hal tersebut untuk mengantisipasi apabila pemilik tidak lagi bergabung dengan perusahaan tersebut, bisa mengambil kembali kendaraannya, karena kalau STNK atas nama perusahaan berarti menjadi milik perusahaan. "Yang menjadi masalah di sini membayar, balik nama di STNK itu ada PNBP-nya, untuk saat ini masih dibebankan kepada pemilik pribadi," ujarnya.

Selanjutnya, perusahaan harus memiliki 'pool' fasilitas perawatan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain. "Misalnya, boleh juga kerja sama pemanfaatan garasi, selama ini 'kan ditempatkan di garasi masing-masing pemilik,' imbuhnya.

Syarat lain, di antaranya, mempekerjakan pengemudi dengan SIM. @munih



MTABA FOTO: Iwanayoh Prita
PENGRAJIN KERUPUK JENGEK: Pengrajin menjemur kerupuk jengek di Desa Lamsiem Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Senin (25/4). Kerupuk jengek yang terbuat dari bahan baku kulit sapi dan tepung yang dijual Rp5.000-Rp10.000 per kantong ukuran 5 kg dan mampu menambah pendapatan ekonomi keluarga serta membuka lapangan kerja.

PENANAMAN MODAL

Indonesia-Belanda Sepakat Bisnis US\$ 606 Juta

NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat empat kesepakatan bisnis dengan nilai keseluruhan 606 juta dolar AS ditandatangani dalam Forum Bisnis Indonesia dan Belanda di Den Haag, Jumat pekan lalu, dikutip dari Antara, kemarin, di Jakarta.

Kepala BKPM Franky Sibarani yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan menyambut positif empat kesepakatan terkait dengan investasi sehingga dapat memberikan "multiplier effect" terhadap perekonomian.

"Kesepakatan ini menguatkan posisi Belanda sebagai negara sumber investasi utama. Sekaligus sesuai dengan upaya pemerintah menjadikan investasi sebagai salah satu penggerak ekonomi," kata Franky usai acara forum bisnis di Den Haag Belanda.

Empat kesepakatan bis-

nis yang ditandatangani meliputi sektor energi terbarukan dan infrastruktur sebesar 600 juta dolar AS, industri solar panel 185 juta dolar AS, agribisnis senilai 10 juta dolar AS, dan pengembangan SDM Maritim 11,2 juta dolar AS.

"Sektor infrastruktur, energi terbarukan, agribisnis dan industri merupakan sektor prioritas pemerintah. Kami positif dengan kerjasama di sektor-sektor tersebut," ujar Franky.

Dalam forum bisnis yang dihadiri lebih dari 300 kalangan pebisnis Belanda tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pidato. Presiden menekankan tentang upaya pemerintah mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi.

Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani yang menjadi salah satu panelis memaparkan tentang reformasi layanan investasi yang

sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah perubahan BKPM dari rezim perizinan menjadi rezim pelayanan.

"Salah satu implementasi rezim pelayanan adalah BKPM menjadi one stop shop untuk investasi, di mana investor Belanda yang ingin berinvestasi cukup datang ke kantor BKPM untuk memperoleh seluruh layanan terkait," jelasnya.

Dari data BKPM, untuk periode 2010-2015 realisasi investasi dari Belanda mencapai Rp70 triliun atau berada di peringkat keenam daftar peringkat realisasi investasi per negara. Nilai realisasi Belanda tersebut di atas Inggris yang berada pada posisi 16 dengan nilai realisasi mencapai Rp31 triliun.

Belanda masuk dalam tujuh negara Eropa yang menjadi prioritas pemasaran investasi BKPM. Merujuk data BKPM terkait dengan komitmen investasi dari negara-negara Eropa

pada bulan Januari 2016 mencapai Rp6,53 Triliun, naik hampir 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp670 miliar.

Kenaikan komitmen investasi Eropa tersebut melanjutkan trend positif tahun 2015, di mana komitmen investasi Eropa sepanjang tahun 2015 mengalami kenaikan 16 persen menjadi Rp37,3 triliun dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp32,2 triliun.

Pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani nota kesepahaman berbagai bidang termasuk maritim dan pendidikan dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, di Den Haag, Jumat pekan lalu. Jokowi dan delegasi Indonesia tengah dalam kunjungan keempat negara Eropa Barat, Jerman, Belgia, Inggris, dan Belanda. "Saya sangat bahagia karena dapat membalas

kunjungan PM Rutte ke Indonesia pada 2013," kata Jokowi. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam penandatanganan nota kesepahaman itu. Ada beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani Indonesia dan Belanda, di antaranya di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan serta kerja sama maritim.

Belanda mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sepakat bahwa laut, teluk dan samudera adalah masa depan semua pihak, kata Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda Melanie Schulz di Rotterdam, Jumat pekan kemarin, ketika Presiden Jokowi blusukan di Pelabuhan Rotterdam.

Melanie Schulz mengatakan Pemerintah Belanda sangat berbagas karena dapat menunjukkan bagaimana Belanda mengelola lautan yang jadi kebanggaan negeri ini. @munih

Pemerintah Promosi Bisnis ke Para Pengusaha Eropa

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berbicara dalam acara UK-Indonesia Business Forum, yang digelar di London, Inggris. Presiden Jokowi menjadi pembicara dalam forum bisnis yang dihadiri sekitar 300 pengusaha Inggris tersebut. Franky menjelaskan, dalam forum tersebut pihaknya memaparkan bentuk reformasi layanan investasi yang dilakukan pemerintah.

Jika menekankan bertekad menjadikan lembaga tersebut sebagai "one stop shop" untuk investasi. "Dengan konsep 'one stop shop', investor cukup datang ke BKPM untuk memanfaatkan layanan dari 22 Kementerian/Lembaga di PTSP Pusat, mengurus izin investasi melalui layanan tiga jam, maupun fasilitasi ketika melakukan realisasi," katanya, dikutip dari Antara, akhir pekan lalu.

Perikanan Susi Pudjiastuti juga dijadwalkan memberikan paparan tentang potensi investasi sektor maritim di Indonesia. Dalam forum tersebut juga direncanakan akan dilakukan penandatanganan kesepakatan bisnis, yang salah satunya terkait dengan komitmen investasi. "Ada beberapa perusahaan yang melakukan announcement rencana investasinya di Indonesia dan beberapa perusahaan melakukan MoU dengan mitra lokalnya di Indonesia," tambah Franky.

Inggris merupakan salah satu sumber investasi dunia. Menurut data Financial Times, investasi dari Inggris ke seluruh dunia pada tahun 2015 mencapai 229 miliar dolar AS, dari jumlah tersebut yang mengalir ke Indonesia kurang dari 1 persen. Negara kerajaan itu banyak menanamkan modalnya ke AS, India dan Australia.

Dalam catatan BKPM, realisasi investasi Inggris di Indonesia sejak tahun 2010-2015 tercatat 950 proyek mencapai 4,8 miliar dolar AS dan menyerap 214 ribu tenaga kerja. Realisasi investasi dari Inggris selama tahun 2015 mencapai 503 juta dolar AS, naik 22,98 persen dari rata-rata investasi pada tahun 2010-2014 yang berada di posisi 409 juta dolar AS.

Komunikasi Presiden Ari Dwiyanaya menyebutkan Pada saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan PM Inggris David Cameron tengah berlangsung, di ruangan terpisah disepakati dan ditandatangani sejumlah perjanjian kerja sama di berbagai bidang.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua negara merupakan bentuk pencapaian yang diperoleh dari kunjungan resmi Presiden Jokowi ke Inggris. Ada lima nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara, yaitu MoU Kerja sama Industri-Industri Kreatif, MoU Kerja sama Pendidikan Tinggi, MoU Kerja sama Informasi dan Pengalaman Dalam Penyelenggaraan Even Olahraga Dunia, dan Pengaturan tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan serta MoU antara PT Garuda dengan Airbus dan Roll Royce.

MoU tersebut ditandatangani oleh antara lain Menlu RI Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Dirut Garuda Indonesia, M Arif Wibowo. MoU kerja sama informasi penyelenggaraan even olah raga dunia, memberikan kerangka untuk berbagi pengalaman dan informasi antara lain dalam strategi dan program untuk memaksimalkan pengembangan perdagangan, meningkatkan peluang bisnis, formulasi perencanaan dan investasi yang didapat dari even olahraga. @munih

INDUSTRI GAS

FSRU Lampung Kembali Terima LNG Kilang Tangguh

NERACA

Jakarta - Fasilitas Unit Penampungan dan Regasifikasi Terapung (Floting Storage and Regasification Unit/FSRU) Lampung kembali menerima satu kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Kilang Tangguh, Papua. "Kargo ini yang kedua diterima FSRU Lampung dari total 1,1 juta meter kubik LNG yang berasal dari Tangguh pada tahun ini," kata Direktur Utama PT PGN LNG Indonesia Mugiono di Jakarta, kemarin.

PGN LNG Indonesia adalah anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) yang mengelola FSRU Lampung. Kargo LNG pertama sudah di-

terima FSRU Lampung pada 2 April 2016. Menurut Mugiono, setelah berlayar sekitar satu minggu dari Papua, kapal pembawa LNG yang mengangkut satu kargo atau setara 137.700 meter kubik merapat di FSRU Lampung yang berlokasi di laut, sekitar 21 kilometer dari tepi pantai Labuan Mangrove Lampung, Minggu. "Selanjutnya, dilakukan proses bongkar muat an-tarkapal atau 'ship to ship transfer' (STS)," katanya. Ia mengatakan, LNG dari FSRU Lampung tersebut akan diperkuat pasokan gas PGN khususnya pelanggan di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan.

Sebelum disalurkan, LNG tersebut melalui proses regasifikasi atau diubah dari bentuk LNG yang cair

menjadi gas. Dari FSRU Lampung, gas tersebut mengalir melalui pipa bawah laut menuju ke stasiun penerima di Labuan Mangrove dan kemudian terhubung dengan pipa South Sumatera West Java (SSWJ) untuk didistribusikan ke pelanggan PGN di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan.

Sementara itu, Direktur PGN Danny Pradipta menambahkan, selain memenuhi kebutuhan gas untuk pelanggan industri, komersial, UKM dan rumah tangga, FSRU Lampung juga memasok pembangkit listrik. "FSRU Lampung siap mendukung 'supply' gas bumi yang ramah lingkungan dan swasembada sumber energi domestik untuk proyek listrik 35.000 MW yang digi-

gas Presiden Joko Widodo, utamanya di Jawa bagian barat, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung," katanya.

PGN, lanjutnya, juga mengembangkan kapal mini LNG (mini LNG sea transportation), yang akan membawa LNG dari FSRU Lampung ke pembangkit berbagai wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. FSRU Lampung memiliki kapasitas penampungan LNG 170.000 m3 dan kemampuan regasifikasi 240 MMSCFD (juta kaki kubik per hari).

Pada 2015, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 1.591 MMSCFD yang menciptakan penghematan secara nasional sebesar Rp88,03 triliun per tahun. PGN kini memiliki dan me-

ngoperasikan pipa gas bumi hilir sepanjang 7.000 km atau setara 76 persen secara nasional.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) semakin agresif menambah infrastruktur pipa gas bumi nasional sehingga saat ini sudah mengoperasikan jalur gas sepanjang total 7.026 kilometer. "Meningkat dibanding total panjang pipa 2014 sepanjang 6.161 kilometer," kata Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup.

Menurut Heri, dengan pipa transmisi dan distribusi gas bumi sepanjang itu, PGN mengoperasikan lebih dari 76 persen pipa gas bumi hilir di seluruh Indonesia. PGN mengargetkan hingga 2019 akan menambah infrastruktur pipa gas lebih 1.680 km. @munih

alkindo
PT ALKINDO NARATAMA Tbk.

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Alkindo Naratama Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016. Panggilan untuk RUPS yang mencantumkan acara RUPS akan diumumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia berpedoman nasional Rabu, tanggal 11 Mei 2016.

Pikak yang berhak menghadiri RUPS adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, setiap usulan dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara dapat dimasukkan dalam rapat acara RUPS sepanjang usulan tersebut sudah diterima Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS.

Bandung, 26 April 2016
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS PT. TROPICAL ACID OIL ("PERSEROAN")

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT. TROPICAL ACID OIL, tertanggal 22 April 2016, yang dibuat dihadapan VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara lain telah diputuskan Penurunan Modal Dasar dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) serta Penurunan Modal Disetor dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Segala keberatan dapat disampaikan secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak pengumuman ini kepada Direksi Perseroan di alamat:

Gedung Belgio Residence & Mall
Unit OUG-26
Jl. Mega Kuningan Barat, Kav. No. E.4.3
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12950

dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI. Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan,

Jakarta, 26 April 2016
Direksi Perseroan

reksa dana **mandiri**
investasi

PENGUMUMAN DANA KELOLAAN REKSA DANA PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

Sesuai dengan ketentuan angka 20 dan 21 Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Peraturan Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan ini kami PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI selaku Manajer Investasi mengumumkan dana kelolaan yang diperoleh oleh Reksa Dana pada saat tanggal Emisi dengan rincian sebagai berikut:

Nama Reksa Dana	Dana Kelolaan saat Emisi
Reksa Dana Terproteksi MANDIRI SERI 47	Rp. 221.590.000.000
Reksa Dana Terproteksi MANDIRI SERI 48	Rp. 515.800.000.000

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 26 April 2016
Manajer Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi
Group of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Toba Pulp Lestari
PT TOBA PULP LESTARI Tbk
BERKEDUDUKAN DI MEDAN ("PERSEROAN")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2015 ("Rapat") akan diadakan pada tanggal 03 Juni 2016.

Usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan.

Panggilan untuk Rapat dimaksud beserta acara-acarannya akan diumumkan melalui surat kabar pada tanggal 12 Mei 2016.

Yang berhak menghadiri Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari sebelum tanggal Panggilan.

Medan, 26 April 2016
Direksi